

Kop Surat Satker

Nomor : tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pengajuan SPM Di Luar Batas Waktu

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
di Kupang

Sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pengajuan SPM Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Terdapat keterlambatan pengajuan SPM dengan rincian **) sebagai berikut:

No	Kode/Nama KPPN	Kode/Nama Satker	Jenis SPM	SPM			Nama Bank Penerima (***)	Alasan Keterlambatan (****)	Keterangan (*****)
				Nomor	Tanggal	Nilai			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									No Tanggal BAPP/BAST (untuk SPM LS Kontraktual
2.									
3.									dst

2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar diberikan persetujuan pengajuan atas SPM dimaksud.
3. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan dokumen bukti penolakan/pengembalian SPM dari KPPN *****).
4. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas SPM sebagaimana tersebut pada angka1, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari KuasaPengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
eselonI penanggung jawab
Program/Pejabat pada unit pembina
keuangan TNI/POLRI*)

Nama

.....

Tembusan:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Negara
2. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga atau Kepala Pembina Keuangan pada masing masing Unit Organisasi TNI/POLRI

Catatan:

*) Pilih salah satu

**) Dapat berupa lampiran

***) Khusus pengajuan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada hari kerja terakhir Bulan Desember 2025. Diisi dengan nama bank namun tidak perlu rincian nilai per bank. Contoh: SPM X pada kolom (7) bernilai 100 Juta untuk 3 bank penerima, maka di kolom (8) dituliskan rincian bank penerima misal Bank Mandiri, BNI dan BRI

****) Contoh alasan keterlambatan meliputi Keterlambatan pengajuan tagihan atau kurang lengkap dokumen tagihan oleh penyedia, Permasalahan pengelolaan perbendaharaan, Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam, Kondisi lain dibuktikan surat pernyataan KPA, Kondisi kahar/force majeure, Pemilu/Pilkada Serentak atau alasan-alasan lainnya sesuai kondisi yang terjadi.

*****) Untuk Jenis SPM LS Kontraktual diisi Nomor Tanggal BAPP/BAST

*****) Apabila sudah melewati batas waktu, SPM tidak perlu diajukan terlebih dahulu ke KPPN untuk mendapat surat penolakan. Tidak perlu mencantumkan nomor 3 apabila tidak ada penolakan SPM.

Kop Surat Satker

SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN PENGAJUAN SPM

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP :
Satuan Kerja :
Unit Organisasi :
Kementerian/Lembaga :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Terdapat keterlambatan pengajuan SPM berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025, dengan rincian *) sebagai berikut:

No	Kode/Nama KPPN	Kode/Nama Satker	Jenis SPM	SPM			Nama Bank Penerima **)	Alasan Keterlambatan ***)
				Nomor	Tanggal	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								

2. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas SPM diatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,20xx

Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat eselonI penanggung jawab Program/Pejabat pada unit pembina keuangan TNI/POLRI ***)

Nama
NIP/NRP

Catatan:

*) Dapat berupa lampiran

**) Khusus pengajuan ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada hari kerja terakhir Bulan Desember 2025. Diisi dengan nama bank namun tidak perlu rincian nilai per bank. Contoh: SPM X pada kolom (7) bernilai 100 Juta untuk 3 bank penerima, maka di kolom (8) dituliskan rincian bank penerima misal Bank Mandiri, BNI dan BRI

) Contoh alasan keterlambatan meliputi Keterlambatan pengajuan tagihan atau kurang lengkap dokumen tagihan oleh penyedia, Permasalahan pengelolaan perbendaharaan, Pekerjaan dalam rangka KOP SURAT SATUAN KERJA penanganan bencana alam, Kondisi lain dibuktikan surat pernyataan KPA, Kondisi kahar/force majeure, Pemilu/Pilkada Serentak atau alasan-alasan lainnya sesuai kondisi yang terjadi. *) Pilih salah satu